WALIKOTA SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib melindungi segenap warga masyarakat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum;

b. bahwa wilayah daerah Kota Surakarta memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial yang menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa sehingga perlu mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana;

c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana harus menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor -, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Surakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
5. Walikota adalah Walikota Surakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah lembaga Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
14. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain: asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
17. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

18. Mitigasi ...

18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
24. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
25. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
26. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan atau turunannya, termasuk barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya: sembako, obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, kantong tidur *(sleeping bag)*, perlengkapan bayi, perlengkapan keluarga seperti pembalut wanita, odol, sabun mandi, shampo, detergen, handuk dan lain-lain.
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
29. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

30. Lembaga ...

30. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau yang menjalankan tugas mewakili PBB atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar PBB.

BAB II
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penanggulangan bencana berasaskan:
a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
e. ketertiban dan kepastian hukum;
f. kebersamaan;
g. kelestarian lingkungan hidup; dan
h. ilmu pengetahuan dan tehnologi.

(2) Prinsip dalam penanggulangan bencana:
a. cepat, tepat dan prioritas;
b. koordinasi dan keterpaduan;
c. berdaya guna dan berhasil guna;
d. transparansi;
e. akuntabilitas;
f. pencegahan;
g. berkeadilan gender;
h. tidak diskriminatif; dan
i. nonproletisi.

Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
c. menghargai budaya dan kearifan lokal;
d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

(2) Tanggung ...

(2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai untuk prabencana, saat bencana dan pascabencana;
b. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kemampuan Daerah;
c. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; dan
d. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
b. pembuatan perencanaan pembangunan Daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana pada prabencana, saat bencana, dan pascabencana;
c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau dengan Pemerintah Daerah lain;
d. pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam; dan
f. pengaturan dan pengendalian untuk pengumpulan dan penyaluran bantuan.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 7

(1) Setiap Orang berhak:
a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;

d. berperan ...

d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap Orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
(3) Setiap Orang yang terkena bencana akibat kegagalan konstruksi berhak untuk mendapatkan ganti kerugian.

Pasal 8

(1) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal dan non formal.
(2) Tata Cara untuk mendapatkan hak atas pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Setiap Orang berkewajiban:
a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan berhak:
a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
b. mendapatkan perlindungan dalam pelaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan/atau
c. melaksanakan kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan berkewajiban:
a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan

b. melaporkan ...

b. melaporkan kepada BPBD dalam pengumpulan uang dan/atau barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan serta menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Pasal 13

Lembaga Usaha dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.

Pasal 14

(1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Lembaga Usaha harus menyesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh BPBD;
(2) Lembaga Usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan/atau BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan;
(3) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Lembaga Usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional

Pasal 15

(1) Lembaga Internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana di Daerah.
(2) Lembaga Internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di Daerah berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.

Pasal 16

(1) Lembaga Internasional dalam penanggulangan bencana wajib berkoordinasi dan menyelaraskan kegiatannya dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Lembaga Internasional wajib memberitahukan mengenai aset penanggulangan bencana yang digunakan kepada Pemerintah Daerah.
(3) Lembaga Internasional wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah.
(4) Lembaga Internasional wajib mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Lembaga Internasional mitra Pemerintah Daerah dan BPBD serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana alam terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi:
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.

Pasal 19

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana alam dilaksanakan berdasarkan 4(empat) aspek meliputi:
a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
b. kelestarian lingkungan hidup;
c. kemanfaatan dan efektifitas; dan
d. lingkup luas wilayah.

Pasal 20

(1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana alam, Pemerintah Daerah dapat:
    a. menetapkan lokasi Rawan Bencana menjadi lokasi terlarang untuk pemukiman; dan/atau
    b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan atas suatu benda.
(2) Tempat tinggal yang dinyatakan sebagai lokasi terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prabencana

Pasal 21

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana alam pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
a. situasi tidak terjadi bencana; dan
b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1 ...

Paragraf 1
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
a. perencanaan penanggulangan bencana;
b. pengurangan risiko bencana;
c. pencegahan;
d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
e. persyaratan analisis risiko bencana;
f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
g. pendidikan dan pelatihan; dan
h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 23

(1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD dan ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
(3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
(4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
c. analisis kemungkinan dampak bencana;
d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
(5) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
(6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pelaku penanggulangan bencana wajib untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 24

(1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;

b. perencanaan ...

b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
c. pengembangan budaya sadar bencana;
d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana;

(3) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB).
(4) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non Pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Usaha di Daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.
(5) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan SKPD yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana.
(6) RAD-PRB ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi:
a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 26

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 27

(1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
(2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala BPBD dengan melibatkan SKPD terkait.
(3) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang, pengambilan tindakan pencegahan, dan mitigasi bencana.

Pasal 28 ...

Pasal 28

(1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
(2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
(3) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.
(5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara;
c. pencabutan izin; dan
d. pembongkaran.

Pasal 29

(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
(2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
(3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 30

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi Bencana.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
(3) SKPD terkait dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Paragraf 2
Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 31 ...

Pasal 31

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
a. Kesiapsiagaan;
b. Peringatan Dini; dan
c. Mitigasi Bencana.

Pasal 32

(1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
    b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
    c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
    d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
    e. penyiapan lokasi evakuasi;
    f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
    g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 33

(1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
(2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

(1) Untuk Kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BPBD membangun sistem manajemen logistik dan peralatan.
(2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada di Daerah.

Pasal 35

(1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat;
(2) Peringatan Dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. pengamatan gejala bencana;
    b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;

c. pengambilan ...

c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

(3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh BPBD sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.

(4) Peringatan Dini wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta, dan media massa di Daerah untuk mengerahkan sumber daya.

(5) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 36

(1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan untuk mengetahui potensi bencana, upaya antisipasi penanganannya serta mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

(2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

(3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

(4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Pasal 37

(1) Dalam kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menyusun basis data (*database*) dan peta kebencanaan yang meliputi:
a. luas wilayah;
b. jumlah penduduk;
c. jumlah rumah, gedung, dan sarana umum, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
e. lokasi rawan bencana dan risiko bencana;
f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
g. jalur evakuasi;
h. lokasi pengungsian; dan
i. petugas penanggulangan bencana.

(2) Basis ...

(2) Basis data (*database*) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
   a. menyusun kebijakan, strategi dan rencana tindakan penanggulangan bencana;
   b. mengidentifikasi, memantau, dan mengawasi bahaya bencana;
   c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di lokasi rawan bencana;
   d. pengembangan sistem peringatan dini;
   e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana;
   f. merencanakan pembangunan yang sesuai dengan wilayah bencana; dan
   g. sebagai informasi kebencanaan bagi masyarakat.

Pasal 38

Dalam rangka Mitigasi Bencana pada kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah menetapkan:
a. batas kawasan rawan banjir;
b. pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk ruang terbuka hijau; dan
c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum.

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah menetapkan wilayah rawan bencana yang meliputi kawasan rawan:
   a. banjir;
   b. longsor;
   c. penurunan tanah;
   d. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air; dan
   e. wabah penyakit.
(2) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasaan rawan bencana dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah menetapkan status siaga darurat bencana atas usulan kepala BPBD;
(2) Status siaga darurat bencana adalah keadaan terdapat potensi bencana yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penetunya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat

Pasal 41

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
   a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
   b. penentuan status keadaan darurat bencana;
   c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
   d. pemenuhan kebutuhan dasar;

e. perlindungan ...

e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

(2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 42

(1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

(2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.

(3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidentifikasi:
a. cakupan lokasi bencana;
b. jumlah korban;
c. kerusakan prasarana dan sarana;
d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 43

(1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Walikota.

(2) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
a. pengerahan sumber daya manusia;
b. pengerahan peralatan;
c. pengerahan logistik;
d. pengadaan barang/jasa;
e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
f. penyelamatan; dan
g. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Pasal 44

Penetapan status darurat bencana paling sedikit memuat:
a. lokasi bencana;
b. jumlah korban;
c. kerugian harta benda; dan
d. jumlah dan jenis kerusakan prasarana dan sarana.

Pasal 45

(1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang berasal dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tindakan tanggap darurat.

(2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal 46 ...

Pasal 46

(1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
(2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 47

(1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ke lokasi bencana.
(2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
(3) Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil instansi/lembaga yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 48

(1) Pada saat terjadi bencana, Kepala BPBD mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
(2) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain yang terdekat, baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain.
(3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan, wajib menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari kota lain yang mengirimkan bantuannya.
(4) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.

Pasal 49

Kepala BPBD dapat mengerahkan peralatan dan logistik dari depo regional yang terdekat ke lokasi bencana yang dibentuk dalam sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 50

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

Pasal 51 ...

Pasal 51

(1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat;
(2) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa;
(3) Pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
(4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
    a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
    b. pertolongan darurat;
    c. evakuasi korban bencana;
    d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
    e. pangan;
    f. sandang;
    g. pelayanan kesehatan; dan
    h. penampungan serta tempat hunian sementara.
(5) Dalam penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaiannya harus segera/tidak dapat ditunda, penunjukan langsung dapat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera termasuk :
    a. akibat bencana alam;
    b. dalam rangka pencegahan bencana alam; dan/atau
    c. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
(6) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD.
(7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 52

(1) BPBD menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran belanja tidak terduga untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.

Pasal 53

(1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6).

(4) Tanda ...

(4) Tanda bukti transaksi lain yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan barang dan/atau jasa saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus.

Pasal 54

(1) Kepala BPBD dapat menerima dana siap pakai secara langsung dari BNPB.
(2) BPBD setelah menerima dana siap pakai melaporkan kepada kepala daerah.
(3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat prioritas.

Pasal 55

(1) BPBD yang telah menerima dana siap pakai wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BNPB paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 56

(1) Kepala BPBD wajib membuat laporan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diterima dari masyarakat;
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.
(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
(2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
    a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
    b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
    c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
    d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
    e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
(3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika:
    a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
    b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
(4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibuka kembali

dengan ...

dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 58

(1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan daya dari:
a. sumber daya antar daerah;
b. Lembaga Internasional yang bertugas menangani bencana;
c. Badan *Search And Rescue* Nasional (BASARNAS);
d. Tentara Nasional Indonesia;
e. Polisi Republik Indonesia;
f. Palang Merah Indonesia;
g. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
h. lembaga sosial dan keagamaan; dan
i. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

(2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/ lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf g, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.

(2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana.

(3) Komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).

(4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam suatu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem komando tanggap darurat bencana diatur dengan peraturan kepala BPBD.

Pasal 60

(1) Komando Tanggap Darurat Bencana mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komando Tanggap Darurat Bencana mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasi penanganan Tanggap Darurat Bencana;
b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;

c. pelaksanaan ...

c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana secara tepat, efisien dan efektif;
d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat;
e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media masa dan masyarakat luas.

Pasal 61

(1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana melalui upaya:
a. pencarian dan penyelamatan korban;
b. pertolongan darurat; dan/atau
c. evakuasi korban.
(2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
(3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BNPB dapat memberikan dukungan kepada BPBD untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
(5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Pasal 62

(1) Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi terhadap Korban Bencana.
(2) Untuk memudahkan penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana dan harta benda, Kepala BPBD terkait mempunyai kewenangan:
a. menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
b. menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelematan;
c. memerintahkan orang untuk ke luar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/ membuka pintu air;
(3) Pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal:
a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
(4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan

kembali ...

kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan Korban Bencana.

Pasal 63

Penanganan masyarakat dan Pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:
a. pendataan;
b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
c. pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 64

(1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
    a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
    b. pangan;
    c. sandang;
    d. pelayanan kesehatan;
    e. pelayanan psikososial; dan
    f. penampungan dan tempat hunian.
(2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
(2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/atau Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.
(3) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. bayi, balita dan anak-anak;
    b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
    c. penyandang cacat; dan
    d. orang lanjut usia.

Pasal 66

Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk memfungsikan prasarana dan sarana vital dengan segera dimana dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Bagian Keempat
Pascabencana

Pasal 67 ...

Pasal 67

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
a. Rehabilitasi; dan
b. Rekonstruksi;

Paragraf 1
Rehabilitasi

Pasal 68

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
   a. perbaikan lingkungan wilayah bencana;
   b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
   c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
   d. pemulihan sosial psikologis;
   e. pelayanan kesehatan;
   f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
   g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
   h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
   i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau
   j. pemulihan fungsi pelayanan publik;
(2) Untuk mempercepat Pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
(4) Segala hal berkenaan dengan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
(5) Prinsip dasar dalam penentuan kebijakan Rehabilitasi adalah sebagai berikut:
   a. menempatkan masyarakat sebagai Korban Bencana, dan pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi;
   b. kegiatan Rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terpadu dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan Pemulihan segera serta kegiatan rekonstruksi;
   c. Pemulihan segera dilakukan oleh Tim Penilai Cepat (*Rapid Assessment Team*) segera setelah terjadi bencana; dan
   d. program Rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat berdasarkan penetapan status dan tingkatan bencana, dengan ketentuan tujuan utama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah tercapai.

Pasal 69

(1) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
(3) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:

a. pengaturan ...

a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
b. kondisi sosial;
c. adat istiadat;
d. budaya; dan
e. ekonomi.

(4) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 70

(1) Dalam melakukan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
(2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi.
(3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana Rehabilitasi kepada Pemerintah harus melalui Pemerintah Provinsi.
(4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa:
a. tenaga ahli;
b. peralatan; dan
c. pembangunan prasarana.

Pasal 71

Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilaksanakan oleh SKPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 72

(1) Perbaikan lingkungan wilayah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan, mencakup lingkungan:
a. kawasan permukiman;
b. kawasan industri;
c. kawasan usaha;
d. kawasan bangunan gedung; dan
e. kawasan penyangga.
(2) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari intansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana.

Pasal 73

(1) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
(2) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data Korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
c. potensi sumber daya yang ada di Daerah Bencana;
d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c;
e. rencana program dan kegiatan;
f. gambar desain;
g. rencana anggaran;
h. jadwal kegiatan; dan
i. pedoman Rehabilitasi;

Pasal 74

Kegiatan perbaikan lingkungan wilayah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan dapat melibatkan masyarakat.

Pasal 75

(1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
(2) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
(3) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah Daerah.
(4) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. perbaikan infrastuktur ; dan
b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 76

(1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
(2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
(3) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan persyaratan:
a. keselamatan;
b. sistem sanitasi;
c. penggunaan bahan bangunan; dan
d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.

(4) Perencanaan ...

(4) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait.

Pasal 77

(1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
(2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
(3) Bantuan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
(4) Perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.

Pasal 78

(1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
(2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
    a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
    b. pendampingan pemulihan trauma; dan
    c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 79

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
(2) Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya :
    a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
    b. membantu perawatan Korban Bencana yang meninggal;
    c. menyediakan obat-obatan;
    d. menyediakan peralatan kesehatan;

e. menyediakan ...

e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
f. merujuk ke rumah sakit terdekat.

(3) Upaya Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

(4) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

(1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f ditujukan membantu masyarakat untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.

(2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat.

(3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 81

(1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.

(2) Kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui:
a. layanan advokasi dan konseling;
b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
c. pelatihan.

(3) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 82

(1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.

(2) Kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di Daerah Bencana;
b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

(3) Pelaksanaan ...

(3) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 83

(1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
(2) Kegiatan Pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
    a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
    b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
    c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
    d. Pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
    e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi Walikota dengan dukungan BPBD dan BNPB.

Pasal 84

(1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
(2) Kegiatan Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
    a. Rehabilitasi dan Pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
    b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
    c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
(3) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di Daerah dengan dukungan BPBD dan BNPB.

Paragraf 2
Rekonstruksi

Pasal 85

(1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
    a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
    b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
    c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
    d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
    e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
    f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;

g. peningkatan ...

g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

(2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3).

Pasal 86

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), dengan memperhatikan:
a. rencana tata ruang;
b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
c. kondisi sosial;
d. adat istiadat;
e. budaya dan kearifan lokal; dan
f. ekonomi.

(2) Rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 87

(1) Dalam melakukan Rekonstruksi, Pemerintah Daerah menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.

(2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Rekonstruksi.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana Rekonstruksi kepada Pemerintah harus melalui Pemerintah Provinsi.

(4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa:
a. tenaga ahli;
b. peralatan; dan
c. pembangunan prasarana.

Pasal 88

Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 89

(1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan

memperhatikan ...

memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, dan aspirasi masyarakat.

Pasal 90

Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat.

Pasal 91

(1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dilakukan dengan cara:
   a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
   b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
   c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
   d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
(2) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan Kepala BPBD.

Pasal 92

(1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana, dan mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana, dilakukan dengan:
   a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
   b. menyesuaikan dengan tata ruang;
   c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
   d. memperhatikan kearifan lokal; dan
   e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana.
(2) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala SKPD terkait.

Pasal 93

(1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan rasa

kepedulian dalam rangka membantu penataan daerah Rawan Bencana, melalui upaya:
a. kampanye peduli bencana;
b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.

(2) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 94

(1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya:
a. pembinaan kemampuan ketrampilan masyarakat yang terkena bencana;
b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan tenaga dan/atau barang; dan
c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.

(2) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 95

Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik ke arah lebih baik, melalui upaya:
a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 96

Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya mengembangkan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

BAB VIII
BENCANA NONALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu
Bencana Nonalam

Paragraf 1
Umum

Pasal 97

Bencana Nonalam meliputi antara lain:
a. kebakaran yang disebabkan oleh manusia;
b. kecelakaan transportasi;
c. gagal teknologi;
d. dampak industri;
e. ledakan nuklir;
f. pencemaran lingkungan hidup;
g. kegiatan keantariksaan;
h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman;
i. gagal modernisasi;
j. kejadian luar biasa akibat epidemi; dan
k. wabah penyakit.

Paragraf 2
Analisis Risiko Bencana Nonalam

Pasal 98

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap Bencana Nonalam yang mengancam ekosistem, kehidupan dan/atau kesehatan serta keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko Bencana Nonalam.
(2) Analisis risiko Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. faktor penyebab risiko;
    b. analisis risiko; dan
    c. pengelolaan risiko.
(3) Format, prosedur, metode dan evaluasi analisa risiko ditentukan oleh instansi/SKPD terkait di bawah koordinasi BPBD.

Paragraf 3
Penanggulangan

Pasal 99

(1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan Bencana Nonalam.
(2) Penanggulangan Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. pemberian informasi peringatan Bencana Nonalam kepada masyarakat;
    b. pengisolasian Bencana Nonalam;
    c. penghentian sumber Bencana Nonalam; dan/atau
    d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 100

Dalam penanggulangan Bencana Nonalam pada tahap tanggap darurat dan pascabencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 67.

Bagian Kedua
Bencana Sosial

Pasal 101

Bencana Sosial meliputi:
a. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
b. teror.

Paragraf 1
Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pasal 102

(1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Daerah menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang difasilitasi dan dibina oleh Walikota;
(2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melaksanakan:
    a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101;
    b. pengkoordinasian camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
    c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 103

(1) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(2) Keanggotaan FKDM terdiri atas wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
(3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    a. menjaring,menampung,mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
    b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat;
(4) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2
Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 104

(1) Dalam membantu masyarakat di Daerah guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap

memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya Daerah dan menjunjung rasa keadilan.

(2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan SKPD terkait, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

(1) Dalam Pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui:
   a. layanan advokasi dan konseling;
   b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
   c. pelatihan;

(2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 3
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 106

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui upaya:
   a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
   b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
   c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

(2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga/SKPD terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

BAB IX
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 107

(1) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai yang berasal dari APBD.

(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan pengelolaannya dilakukan BPBD.

(3) Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 108 ...

Pasal 108

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD.
(2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD dan SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 109

(1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak ada bencana meliputi:
    a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
    b. program pengurangan risiko bencana;
    c. program pencegahan bencana;
    d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
    e. penyusunan analisis risiko bencana;
    f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
    g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
    h. penyusunan standar teknis penangulangan bencana.
(2) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:
    a. kegiatan kesiapsiagaan;
    b. pembangunan sistem Peringatan Dini; dan
    c. kegiatan Mitigasi Bencana.

Pasal 110

(1) Pada saat tanggap darurat, BPBD menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).
(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa meliputi:
    a. pencarian dan penyelamatan korban;
    b. pertolongan darurat;
    c. evakuasi korban;
    d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
    e. pangan;
    f. sandang;
    g. pelayanan kesehatan;
    h. penampungan dan tempat hunian sementara; dan
    i. pembayaran honor petugas yang telah direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.

Pasal 111

(1) Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan/atau barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hasil pengumpulan uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan di BPBD.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 112

Pengelolaan bantuan bencana dikoordinasikan oleh BPBD yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap uang dan/atau barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 113

(1) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana.
(2) Walikota berwenang mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan kepada Korban Bencana.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 114

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
f. perencanaan tata ruang;
g. pengelolaan lingkungan hidup; dan
h. pengelolaan keuangan.

Pasal 115

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan pengumpulan sumbangan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan.

(2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat meminta untuk dilakukan audit.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 116

(1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir, kecuali telah diatur oleh peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Oktober 2013

WALIKOTA SURAKARTA,

FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 11 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH,

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Kondisi wilayah Kota Surakarta memiliki potensi terjadinya bencana, seperti banjir, angin ribut/puting beliung, kebakaran, banjir, wabah penyakit, dan peristiwa lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat.

Seiring dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari paradigma konvensional yang bersifat reaktif terhadap bencana menuju paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif, maka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah harus dilaksanakan secara terencana sejak fase prabencana, fase tanggap darurat dan fase pascabencana. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka pengurangan risiko akibat bencana dapat ditekan serendah mungkin.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah penanggulangan bencana tidak lagi bersifat sentralistik di pusat saja, tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga Pemerintah Daerah akan dengan mudah mengggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, guna melindungi segenap masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Surakarta.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini berisi ketentuan-ketentuan yang merupakan pedoman bagi daerah dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala permasalahan kebencanaan secara komprehensif sehingga penyelesaian masalah secara parsial dapat dihindari. Materi muatan yang diatur adalah menyangkut:

1. tanggungjawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan aksi pra bencana, aksi tanggap darurat dan aksi pasca bencana yang dikoordinasikan, dikomando dan dikendalikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
2. mekanisme pengelolaan serta penggunaan yang tepat asas dari segala sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah dan masyarakat;
3. pengidentifikasian macam-macam bencana dan cara mengantisipasi risikonya;
4. hak dan kewajiban masyarakat serta tanggung jawab mutlak korporasi;
5. mobilisasi masyarakat guna membangun budaya kewaspadaan dini terhadap bencana; dan
6. hal-hal lain yang bertujuan memberikan pelayanan publik secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan pelindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan"asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana

harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip berdaya guna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berhasil guna" adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip tidak diskriminatif" adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD, yaitu dana yang dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ancaman bencana" adalah setiap gejala/bencana alam atau kegiatan/peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kerentanan masyarakat" adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "analisis kemungkinan dampak bencana" adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindakan pengurangan risiko bencana" adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana" adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia" adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "upaya fisik" adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan "upaya nonfisik" adalah kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukul Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "analisis risiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Huruf a

Yang dimaksud "kebakaran yang disebabkan oleh manusia" adalah kebakaran yang disebabkan oleh ulah/kealpaan

manusia yang berakibat luas terhadap korban jiwa dan/atau kerugian harta benda baik milik pribadi maupun fasilitas umum.

Huruf b

Yang dimaksud "kecelakaan transportasi" adalah kecelakaan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan bermotor atau sejenisnya dengan atau tanpa pemakai jalalainnya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda yang bersifat masal.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud "kegiatan keantariksaan" adalah kegiatan luar angkasa yang menyangkut prasarana dan sarana, serta kelengkapan kegiatan keantariksaan termasuk pesawat luar angkasa yang menimbulkan korban jiwa manusia dan/atau harta benda pada suatu kawasan.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Yang dimaksud "epidemi" adalah wabah yang terjadi secara lebih cepat daripada yang diduga, tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan menimbulkan sakit terhadap banyak orang.

Huruf j

Yang dimaksud "wabah penyakit" adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 19